

MELEMAHNYA KEBEBASAN PERS DI FILIPINA**Muhammad Idham Viryawan¹, Shakila Maritza², Siti Setyaningrum¹**¹ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-azhar Indonesia**ABSTRACT**

In the era of globalization that has happened so rapidly lately, journalists have given a new color to the world and broadcasting. This can be seen from how easy it is to get news from online news sites. Currently, it has also been regulated regarding the freedom of the press in obtaining and releasing news that will be consumed by the public, of course in accordance with the journalistic code of ethics. Not a few of the journalists who criticize the decisions of leaders in a country where it is done to build an upright democracy. However, it is unacceptable in the same way that the President of the Philippines did by closing and licensing the Rappler news agency who was innocent of defaming, spreading hoaxes, and embezzling tax funds. From this, the researcher wants to understand more deeply about the problem by revealing it in this scientific journal. The research method used is a qualitative method which is a literature study using the theory of free flow of information. And from this research, it can be concluded that the dictatorship of a leader from the Philippines has limited the human rights that can be done from closing the Rappler news agency because he does not want to damage his reputation as a leader, and it can be said that he always justifies all means in realizing the anti-criticism that exists within him. . In this case but asked by the journalist and owner of the Rappler News Agency, the Court will not accept it and win the president in the case. Because Duterte's actions were supported by a court ruling that ruled that Duterte was victorious, so it is clear that the Philippines does not have the freedom of the press it deserves.

Keywords: Rappler, Philippines, Press Policy, Media, News Site, Closing

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini terjadi perkembangan di berbagai sektor seperti salah satunya yang sangat signifikan yakni sektor teknologi informasi. Pada sektor teknologi informasi ini menawarkan berbagai macam hal seperti kemudahan dalam melakukan komunikasi dengan individu yang lainnya. Dalam melakukan komunikasi tersebut akan memunculkan penyampaian pendapat yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lain karena setiap individu memiliki cara pandang dan cara menilai suatu hal yang berbeda dalam kehidupan. Diketahui secara bersama-sama, saat ini media sosial yang tengah melejit perkembangannya memberikan ruang dan fasilitas terhadap berbagai kegiatan manusia, tak hanya sebagai sarana

komunikasi antar individu saja, media sosial saat ini juga menjadi lapangan pekerjaan pada berbagai bidang termasuk juga di dalamnya yakni media berita atau pers yang berbasis digital atau online. Pada media online saat ini dinilai bahwa penggunaannya baik dari warga biasa dan Pers sangat bebas dalam menyampaikan pendapat dan juga berita yang disajikan pada ruang publik. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat akan dikaji lebih mendalam khususnya pada hal yang dilakukan oleh banyak jurnalis dalam mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasannya dan tidak bisa mengkritisi pemerintah (Suri, 2012:178-179).

Secara konstitusi yang dimaksudkan dengan kebebasan Pers yakni adalah suatu hak yang diberikan secara konstitusional dan memiliki perlindungan hukum yang berkaitan dengan media atau bahan yang nantinya akan dipublikasikan pada masyarakat luas dengan menggunakan media seperti situs berita yang terjadi saat ini tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Sedangkan dilihat dari sisi konseptualnya, kebebasan pers akan melahirkan pemerintah yang lebih bijaksana, cerdas, dan bersih. Dengan melalui kebebasan pers ini masyarakat akan mengetahui segala peristiwa yang tengah terjadi termasuk juga kinerja dari pemerintah, sehingga akan menimbulkan suatu mekanisme check and ballance serta adanya kontrol terhadap kekuasaan. Oleh karenanya, media saat ini dijuluki sebagai pilar demokrasi karena pada dasarnya tujuan dari kebebasan pers tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas demokrasi di suatu negara. Dengan adanya kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk dapat memberikan berbagai macam informasi, sehingga dapat memperkuat serta mendukung warna negara untuk lebih berperan terhadap demokrasi di negaranya (Romli, 2008:118-120).

Di negara Filipina kebebasan Pers tidak dapat dilakukan serta merta hanya untuk mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Pemerintah Filipina yang saat ini dipimpin oleh Duterte (Eka & Hamdam, 2020:163). Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah untuk menutup situs

berita online Rappler yang dinilai bahwa outlet berita tersebut melanggar undang-undang kepemilikan asing dalam pengamanan dana, penghindaran pajak serta pencemaran nama baik di dunia maya. Duterte sebagai Presiden Filiphine saat ini menutup situs berita Rappler satu hari sebelum masa jabatannya habis, dan ia juga mengatakan bahwa situs berita Rappler ini merupakan situs berita palsu.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam menyampaikan segala sesuatu di media online terlebih lagi pada profesi jurnalis yang tentu saja harus berdasarkan kode etik jurnalistik dalam pencarian berita hingga menyampaikan suatu berita pada khalayak umum termasuk juga dalam hal mengkritisi pemerintah selayaknya dipahami secara seksama bahwa kemerdekaan berpendapat tersebut tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja akan tetapi dalam kebebasan berpendapat juga diatur di dalam undang-undang yang mana mengatur mengenai batasan dari kebebasan itu sendiri. Dari permasalahan yang terjadi tersebut didapatkan judul yakni “Penutupan Media Rapple Oleh Pemerintah Filiphine Karena Adanya Dugaan Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya” untuk dikaji lebih mendalam pada bagian pembasan untuk mengetahui secara jelas sebab dan akibat yang terjadi dari permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka dengan menggunakan buku dan literatur yang lain sebagai objek utama penelitian. Jenis dari penelitian yang digunakan yakni kualitatif yang merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif perlu untuk dilakukan analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif sistematis, analitis dan kritis. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi (Afifuddin & Ahmad, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Filipina merupakan negara yang termasuk ke dalam bagian kawasan Asia Tenggara bersama dengan negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapura, Brunei, Kambola, dan Timor Leste. Dalam menjalani kehidupan demokrasi pada setiap negara akan mengalami perbedaan dan tidak bisa disamakan. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang menjadi pokok permasalahan yang utama pada negara Filipina yakni permasalahan demokrasi yang mana di Filipina menggunakan sebuah prinsip yakni hak politik dan kebebasan sipil. Dalam

periode terakhir ini tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte yang mana indeks demokrasi di negara tersebut mengalami stagnasi dan cenderung penurunan. Hal tersebut disebabkan diawali dengan permasalahan narkoba dimana Duterte ingin memerangi narkoba yang malah menikbulkan terjadinya aksi tembak di tempat terhadap terduga pengguna serta pengedar narkoba. Dalam perspektif pluralisme di bidang politik, negara Filipina mengalami kenaikan kekerasan terhadap pihak oposisi. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk kriminalisasi dan penuntutan terhadap oposisi yang dituntut oleh pihak dari pemerintahannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua aspek dari negara ini yang mengalami penurunan adalah aspek kebebasan yang terbagi menjadi dua yaitu aspek hak politik dan aspek kebebasan sipil. Sedangkan yang kedua yakni aspek peraturan dan regulasi. Ditinjau dari data-data yang dipaparkan oleh peneliti terdahulu dimana kedua aspek tersebut secara simultan mengalami penurunan tepat pada tahun 2016-2020 (Kristal, 2021:126-129).

Berbicara mengenai kebebasan pers dan perkembangan dari teknologi yang terjadi saat ini apabila dibandingkan dengan kemajuan demokrasi akan cenderung memiliki jalinan instrinsik. Selama beerjalan bertahun-tahun, kemajuan demokrasi menunjukkan adanya hubungan positif dengan kebebasan pers. Sebagai komponen penting kemajuan demokrasi, pers, dan

media yang bersifat lebih bebas serta memiliki kapasitas dan berintegritas akan diyakini memiliki peranan dalam pengungkapan fakta dan kebenaran. Disamping itu, pers dan media yang bebas juga dapat memberikan informasi kepada warga negara atau konstituen sehingga turun serta dalam memperkuat suatu demokrasi yang terjadi di negara tersebut. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, pers dan media akan dinggap sebagai pilar keempat setelah jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kualitas demokrasi dari suatu negara salah satunya akan bertumpu pada warga negara atau pemilih yang mendapatkan informasi yang baik dan lebih memadai, salah satunya dari lembaga media yang kredibel dan independen. Pers juga dinilai menalakan perannya dalam berkontribusi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dan inklusi dalam proses demokrasi di suatu negara (Shodiq, 2021:142-144).

Dilihat dari data yang didapat melalui web Freedom House yang menunjukkan bahwa kebebasan Pers di negara di dunia khususnya negara Filiphina mengalami kemerosotan selama satu dekade terakhir ini. Kemerosotan kondisi ini diduga diakibatkan oleh menguatnya populisme sayap kanan yang mana akan merusak kebebasan dasar di banyak negara yang menjunjung paham demkoratis. Meskipun negara di Asia Tenggara khususnya di negara Filiphina sendiri kehidupan demokrasiya masih dalam tahapan beerkembang, sehingga sudah jelas bahwa tren kemunduran

demokrasi yang tertera pada Web Freedom Hoouse dapat dibuktikan kredibelitasnya. Di bawah ini akan dilampirkan tabel mengenai Skor Kebebasan pada negara Filiphina dari tahun 2017-2021:

Tabel 1 Skor Global Freedom Negara Filiphina

Skor Global Freedom					Rata-Rata
'17	'18	'19	'20	'21	
63	62	61	59	56	60,2

Sumber: (Freedom House, 2020)

Dari data diatas didapat bahwa rata-rata Global Freedom negara Filiphina berada diangka 60,2. Secara umum kemunduran demokrasi yang dapat dilihat dari skor global freedom pertahunnya disebabkan karena semakin melemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi di suatu negara, seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan mengalami ketidak sesuaian dengan latar belakang dan kondisi dari suatu negara tersebut. Keemunduran dari demokrasi ini juga dapat terjadi kaena inisiasi pemimping yang berkuasa. Mereka cenderung sengaja mempergunakan hukum dengan tujuan anti demokrasi.

Di negara Filiphina kebebasan demokrasi yang tentu saja mengarah kepada kebebasan pers sangat perlu dikaji ulang dan diterapkan sebuah peraturan agar membentuk sebuah demokrasi yang tercipta untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut adanya kemungkinan sangatlah sulit diwujudkan karena dalam kehidupan pers di negara Filiphina penuh dengan jecaman dan

serangan dari pemerintahnya. Rancangan Undang-Undang yang terbaru dimana akan disahkan oleh DPR negara Filipina memberi lampu hijau pada kongres yang dalam aturannya tertulis mengenai pelarangan reporter yang dianggap mencemarkan reputasi dari anggota dewan maupun dari jajaran pemimpin. Pembatasan yang dilkaskan oleh pemerintah tersebut merupakan suatu perenggutan terhadap kebasan dan akan ada pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Hal tersebut dapat dikaji seksama dari kasus yang terjadi antara kantor berita Rappler dengan pemerintah dimana pemerintah khususnya Duterte merasa berita yang diunggah oleh media Rappler mencemarkan nama baik serta cenderung bersifat Hoax. Tidak hanya itu, Duterte mengumpulkan segala kesalahan yang adanya kemungkinan dilkaskan oleh kantor media Rappler tersebut demi penutupan dari kantor media Rappler ditindak tegas oleh lembaga yang berwajib. Tuduhan pencemaran nama baik yang juga dilayangkan kepada jurnalis Maria Ressa yang juga sebagai pemilik media tersebut terlalu mencampuri urusan Pemerintah. Selain itu jika menarik benang merahnya kebelakang, pada tahun 2018 SEC memerintahkan untuk mmebatalkan sertifikat dari pendirian media rappler, serta mengklaim bahwa organisasi dari berita Rappler ini mengizinkan para investor asing Omidyar Network untuk memegang Philippine Depositary Receipts, sebuah instrumen keuangan yang dominan anggotanya yakni emiten entitas asing

untuk mendapatkan dan membeli keuntungan finansial. SEC juga menilai bahwa Rappler ini melakukan tindak pidana penipuan.

Dari uraian tersebut dapat dinilai bahwa demokrasi yang berjalan di negara Filipina mengalami kemunduran semenjak dipimpin oleh Duterte dimana dikarenakan karena adanya pembatasan dari kebebasan berpendapat yang seringkali diunggah dan menjadi konsumsi publik. Awal mula pembatasan tersebut karena pemerintah merasa Rappler sering sekali dalam hal mengkritik pemerintah. Sehingga munculah tuduhan bahwa media Rappler ini menyebarkan berita palsu serta mencemarkan nama baik pemerintah. Perintah dari Duterte tersebut dilayangkan satu hari sebelum Duterte akan lengser dari kursi jabatannya sebagai Presiden Filiphine dan dilakukan karena menganggap Rappler adalah musuh bebuyutannya. SEC yang dinilai sebagai bala bantuan dari Duterte memerintahkan agar Rappler akan segera ditutup.

Maria Ressa sebagai pendiri dari Rappler m dalam hal penutupan media tersebut tidak tinggal diam karena juga ikut berupaya dalam hal penutupan tersebut yakni dengan cara mengajukan banding atas penutupan secara sepihak yang dilakukan oleh SEC dibawah tuntutan dari Duterte. Maria menempuh jalur hukum berharap pengadilan akan berlaku adil dalam memutuskan terkait perintah penutupan kantor berita media Rapple oleh Presiden Duterte. Selain itu Maria berharap besar agar pengadilan meluruskan

permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang terjadi.

Dalam perjalanan Rappler Maria menjelaskan bahwa Rappler satu-satunya situs berita yang sangat kritis terhadap pemerintah Duterte termasuk tindakan kerasnya terhadap narkoba. Komisi sekuritas dan bursa dari Filipina membantu menegaskan bahwa permasalahan itu terjadi atas pencabutan lisensi Rappler atas kesalahan pelanggaran larangan kepemilikan asing dan kontrol media.

Menurut Maria, tindakan Duterte tersebut sebagai upaya untuk membungkam dan mematikan Rappler. Hal tersebut dilakukan oleh Duterte semata-mata dilakukan sebagai balasan dari Pemerintah atas laporan Rappler mengenai pelanggaran hak dalam perang narkoba, penggunaan disinformasi oleh Duterte dan Marcos di media sosial, serta berbagai macam tindakan pelanggaran hak selama enam tahun yang diselewengkan oleh Duterte. Maria juga menyebutkan bahwa hal tersebut yang dilakukan oleh Duterte merupakan sebuah tindakan pelecehan dan intimidasi atau sebuah taktik perpolitikan. Seperti halnya pada negara Rusia yang mana Novaya Gezta yang merupakan outlet media yang bersifat independen dan besar dimana sangat kritis terhadap Pemerintah Presiden Vladimir Putin yang tersisa di Rusia setelah semua media berita ditutup atau diblokir setelah melakukan invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022.

Sebagai informasi yang terjadi saat ini, media telah menjadikan sebuah catatan bahwa Hak Asasi Manusia yang terjadi di Filipina terjun bebas. Tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh Duterte seperti pelanggaran kepemilikan asing dan penggelapan dana pajak ditujukan hanya untuk mengintimidasi jurnalis sekaligus pemilik situs berita tersebut. Dengan penegasan yakni Rappler dituntut untuk dilakukan penutupan karena sering kali mempertanyakan mengenai keakuratan terhadap pernyataan yang diucapkan oleh Duterte. Media ini juga sering kali mengkritisi mengenai perang berdarah Duterte dengan masalah narkoba. Selain itu Rappler juga mengkritik mengenai kebijakan luar negeri, dimana hal tersebut membuat Duterte merasa bahwa keberadaan Rappler ini mengancam reputasinya sebagai kepala pemerintahan.

Duterte yang telah menjabat sejak tahun 2016 yang lalu dengan kebijakan serta keputusannya yang dinilai keras dan dinilai oleh pihak kepolisian bahwa Pemerintah yang dipimpin oleh Duterte tersebut akan melakukan pembelaan diri atas kebijakan-kebijakannya yang dinilai kurang sesuai dengan prinsip demokrasi pada suatu negara. Kasus penutupan media Rappler dan pelaporan terhadap Jurnalis sekaligus pemilik media tersebut yakni Maria Ressa bukan lah permasalahan atas dasar kebebasan pers, melainkan bagian dari prosedur peradilan normal yang timbul dari dugaan pelanggaran hukum.. Duterte juga secara terbuka mengecam Maria dan

situs berita miliknya serta melaporkan secara kritis mengenai berita-berita yang beredar atas kritik terhadapnya. Seperti halnya penutupan stasiun televisi terbesar di Filipina yakni ABS-CBN pada tahun 2020 karena Duterte mengutuskan agar anggota parlemen Filipina menolak untuk memperbarui lisenensi ABS-CBN. Sedangkan tuntutan terhadap Maria yang dijatuhkan atas penuduhan pencemaran nama baik pada tahun 2020 itu ia diduga akan dijatuhi hukuman selama enam tahun penjara dan tetap bebas dengan jaminan saat kasusnya sedang naik banding.

Menurut teori Free Flow Information yang merupakan aliran bebas dari sebuah informasi dengan mengandung prinsip yang di dalamnya bank sekali membahas mengenai imperialisme dari media, globalisasi serta informasi di ranah internasional yang terjadi di beberapa negara. Teori ini digunakan sebagai tanggapan atas teori modernisasi dari komunikasi massa internasional yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Tren teori ini biasanya digunakan oleh negara-negara maju untuk memberikan sebuah informasi dari sebuah negara kepada khalayak umum di dunia mengenai apa yang terjadi dengan tidak ada pembatasan kebebasan pers dan tentu saja tidak melanggar kode etik dari jurnalistik dan penjiarannya (Malik, 2017:110-115).

Dari kasus tersebut ditinjau dari teori Free Flow Information Rappler sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik jurnalisisme, akan tetapi pemerintah membantahnya dan mencari

pembenaran atas berita yang disampaikan oleh Rappler pada situs beritanya bahwa berita tersebut tidak benar dan cenderung menyudutkan pemerintah. Sama halnya dengan situs-situs berita yang lain, Rappler dalam hal mengkritisi kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk menegakkan sebuah demokrasi dan membantu warga negara dalam menuntut hak-hak yang tidak diberikan oleh Duterte sebagai kepala negara yang tidak diberikan kepada rakyatnya. Dalam banding yang dilakukan oleh Maria terhadap kasus yang menyeretnya ditolak oleh pengadilan yang mana berarti hal kasus tersebut dimenangkan oleh penguasa negara Filipina itu yakni Duterte.

Dengan demikian bahwa adanya tuduhan terhadap media berita Rappler atas pencemaran nama baik yang terjadi pada media sosial yang dimaksudkan oleh Duterte adalah atas berita-berita yang disebar oleh Rappler di situs beritanya di media sosial mengenai kritikan terhadap pemerintahan dan keputusan yang dibuat olehnya. Duterte akan tetap berusaha menutup dan tidak mengutuskan kepada anggota parlemen dan aparat yang berwajib untuk mencabut lisenensi pendirian kantor berita Duterte. Maria yang dinilai sebagai jurnalis tangguh tidak serta merta merasa kalah terhadap tuduhan serta hukuman yang akan mengancamnya. Akan tetapi, diketahui dari keputusan pengadilan yang memenangkan Duterte sudah terlihat sangat jelas bahwa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam

mengemukakan pendapatnya dimuka umum, seperti halnya kebebasan pers dalam menyampaikan sebuah berita kepada warga negara dengan harapan berita-berita yang disampaikan kepada masyarakat tidak menyudutkan kediktatoran pemerintah yang mengancam Hak Asasi Manusia seluruh warga negara. Media berita yang ingin berperan dalam tindakan sewenang-wenangpun tidak dapat bernafas lega karena desakan dan tuntutan untuk tidak mengkritisi kebijakan yang dijalankan oleh sebuah pemimpin. Dan dari situlah sudah terlihat secara jelas bahwa demokrasi tidak dapat berjalan dan tidak dapat tegak didirikan hanya karena pemerintah yang anti kritik dan cenderung untuk mementingkan dirinya dan golongannya.

SIMPULAN

Kebebasan Pers dari suatu negara sangat memiliki peranan penting dalam penguatan dan penegakkan demokrasi secara adil dan mengedepankan kemanusiaan. Saran dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh jurnalistik dan dilakukan pengungkahan tentu saja sudah disesuaikan dengan kode etik yang dilakukan oleh jurnalis tersebut. Berbeda halnya dengan pemimpin-pemimpin dengan menerapkan kediktatoran yang mana tidak akan memberikan sebuah ruang bebas terhadap siapa saja termasuk pada jurnalis untuk memberitakan mengenai sisi gelap dari kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah, hal tersebut tentu saja mengancam

reputasi kepemimpinannya. Sama halnya seperti yang terjadi di Filipina, dimana Duterte sebagai pemimpin negara tidak ambil diam mengetahui ada situs berita yang selalu mengkritisi kebijakannya, yang mana sebenarnya kritikan tersebut bersifat membangun dan ingin meluruskan dari keputusan Duterte yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan Duterte tersebut didukung oleh putusan pengadilan yang memutuskan bahwa Duterte yang menjadi pemenang, sehingga sudah secara jelas bahwa di negara Filipina tidak memiliki kebebasan pers yang layak, dan cenderung mengintimidasi jurnalis dalam menyampaikan sebuah kritikan demi untuk menegakkan sebuah demokrasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2017) yang berjudul *Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers di Kota Palangka Raya* yang menjelaskan bahwa pers merasakan ketidakadilan yang dimana ingin memperjelas kedudukan pers dimata hukum menjadi penting, karena hal tersebut dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi insan pers dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC Indonesia. (2022). Media Milik Pemenang Nobel Diperintahkan Tutup oleh Pemerintah Filipina, Tapi Tetap Beroperasi. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.abc.net.au/indonesian/2022-06-30/rappler-beroperasi-normal-tunggu-putusan-pengadilan/101197792>.
- Afifuddin, & Ahmad, B. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka

- Setia.
- Anwar, R. (1996). *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika.
- Assegaf, D. H. (1985). *Jurnalistik Masa Kini; Pengantar ke Praktek Kewartawanan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barus, S. W. (1996). *Jurnalistik; Petunjuk Praktis Menulis Berita*. Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi.
- Berg, B. L. (2004). *Qualitative Research Methods for The Social Science* (Ed. 5). New York: Pearson Education, Inc.
- CNN Indonesia. (2022). Pemerintah Duterte Paksa Media Rappler. Retrieved August 3, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220629/111435-106-814910/pemerintahan-duterte-paksa-tutup-media-rappler>.
- Dewan Pers. (2002). *Etika, Berita Dewan Pers, No 16/September 2002*.
- Dw.com. (2022). Filipina Tutup Media Rappler, Maria Ressa Ajukan Banding. Retrieved August 3, 2022, from <https://www.dw.com/id/filipina-tutup-media-rappler-maria-ressa-ajukan-banding/a-62297028>.
- Edition.cnn.com. (2022). Philippines Orders News Site Rappler to Shut Down, Founder Maria Ressa Says. Retrieved November 3, 2022, from <https://edition.cnn.com/2022/06/28/media/rappler-shut-down-philippines-ressa-intl-hnk/index.html>.
- Harahap, K. (1996). *Kebebasan Pers*. Bandung: Grafitri Budi Utami.
- Juditha, C. (2013). Akurasi Berita dalam Jurnalisme Online (Kasus Dugaan Korupsi Mahkamah Konstitusi di Portal Berita Detiknews). *Jurnal Pekommas*, 16 (3), 145–154. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/222363-akurasi-berita-dalam-jurnalisme-online-k.pdf>.
- Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., Meisyanti, M., Rahmawati, K. J., & Nugroho, H. (2021). Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 136–145. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v6i2.1509>.
- Kompas.com. (2022). Situs Berita Rappler Filipina Diperintahkan Ditutup, Maria Ressa Ajukan Banding. Retrieved October 31, 2022, from <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/29/101500570/situs-berita-rappler-filipina-diperintahkan-ditutup-maria-ressa-ajukan?page=all>
- Kompas.tv. (2022). Situs Berita rappler Diberedel Karena Kritisi Presiden Filipina Duterte. Retrieved November 3, 2022, <https://www.kompas.tv/article/304052/situs-berita-rappler-diberedel-karena-kritisi-presiden-filipina-duterte>.
- Kovach, B., & Rosentiel, T. (2003). *Sembilan Elemen Jurnalisme; Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik* (Yusi A. Pa). Jakarta: Yayasan Panta.
- Kristal, D. (2021). Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 125–139.
- Kurnia, S. S. (2003). *Jurnalisme Investigasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lazarus, R. S. (1976). *Pattern of Adjustment*. Japan: McGraw Hill Kogakusha.
- Lesmana, T. (2013). Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2 (1), 1 - 13. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.249>.
- Liputan6.com. (2022). Media Filipina Rappler Ditutup Pemerintah Duterte, Maria Ressa Ajukan Banding. Retrieved October 31, 2022, from <https://www.liputan6.com/global/read/4997987/media-filipina-rappler-ditutup-pemerintah-duterte-maria-ressa-ajukan-banding>.
- Malik, D. D. (2017). Pendekatan Komunikasi Internasional. *Jurnal Common*, 1(2), 109–117. <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.574>
- Meisyanti, Kencana, W. H., & Nugroho, H. S. (2021). Penelusuran Berita Hoaks Pada

- Kanal Cek Fakta Di Media Online Medcom. id. *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi*, XXVI(3), 237–246. Retrieved from <https://journals.upiyai.ac.id/index.php/IKON/article/view/1794%0Ahttps://journals.upiyai.ac.id/index.php/IKON/article/download/1794/1482>
- Naufal, M. Andhika & Dkk. (2022). Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM. *Jurnal Hasil Penelitian*, 6(1). Retrieved from <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/6127>
- Nur, E. (2021). Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 52. Retrieved from <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/4198>
- Nurhalizah, M. E., & Yuwafik, M. H. (2020). Kebebasan Pers dan Kesenjangan Gender di Filipina pada Masa Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, Dan Anak*, 15(2), 163–181.
- Oktaviany, D. S. (2017). *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina (Studi Lembaga Perwakilan terkait Tugas, Fungsi dan Wewenang)*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Palupi, Rety & Atmaja, Jaka. (2018). Berita Penutupan Hotel Alexis di Media Online. *Jurnal Komunikasi* 9(1). Retrieved from <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/3525/2323>.
- Rahman, Sirojul. (2017). Kejahatan Pencemaran Nama Baik Atas Pemberitaan Pers di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara & Ilmu Komunikasi*, 3 (1), 135-139.
- Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (2021). Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 18 (2), 141–157.
- Reza Novlizal. (2017). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rm.id. (2022). Situs Beritanya Mau Ditutup Pemerintah Filipina Bos Rappler: Ini Pelecehan, Ini Taktik Politik, Kami Tak Akan Menyerah. Retrieved November 1, 2022, from <https://rm.id/baca-berita/internasional/130449/situs-beritanya-mau-ditutup-pemerintah-filipina-bos-rappler-ini-pelecehan-ini-taktik-politik-kami-tak-akan-menyerah>.
- Ruswandi, A. (2002). AS, Perang, dan Kebebasan Pers. *MEDIATOR*, 3(2), 1–7.
- Suara.com. (2022). Pemerintah Filipina Perintahkan Penutupan Rappler, Maria Ressa: Kami Menolak Menyerah pada Mereka. Retrieved October 31, 2022, from <https://www.suara.com/news/2022/06/30/152716/pemerintah-filipina-perintahkan-penutupan-rappler-maria-ressa-kami-menolak-menyerah-pada-mereka>.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187. <https://doi.org/10.46937/17201926848>.
- Top World News. (2020). *Media Dibungkam , Kebebasan Pers Filipina Makin Terancam*. 5.
- Unde, Andi Alimuddin. (2016). Pers dan Demokrasi Indonesia. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/102571-ID-pers-dan-demokrasi-indonesia.pdf>.
- VOA Indonesia. (2022). Maria Ressa: Filipina Menegaskan Perintah Penutupan Situs Berita. Retrieved November 2, 2022, from <https://www.voaindonesia.com/a/maria-ressa-filipina-menegaskan-perintah-penutupan-situs-berita/6637830.html>.
- Wahyuono, J. A., & Widoretno, D. (2022). Studi Etnografi Komunitas Magic : the Gathering Yogyakarta. *Medkom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 02(02), 66–84.
- Widiyawati, W. (2016). Akurasi Dan Objektivitas Berita Media Online. *Jurnal Komunitas*, 98. Retrieved from www.voaindonesia.com.